ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL

TUGAS AKHIR

OLEH :

SEPTIANI YOLANDA SARI

17031156

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL.

Oleh mahasiswa :

NAMA : SEPTIANI YOLANDA SARI

NIM : 17031156

Telah diperiksa dan koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal , 17 Juli 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Erni Unggul, SU., SE, M.Si	Dewi Kartika, SE
NIPY. 10.006.028	NIPY. 009.013.158

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL.

Oleh :

Nama : Septiani Yolanda Sari

Nim : 17031156

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Pengujian Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 30 Juli 2020

Erni Unggul, SU.,SE,M.Si
Pembimbing I

Dewi Kartika, SE
Pembimbing II

Hetika, S.Pd, M.Si
Penguji I

Elisa Purwitasari, SE,M.Acc, Akt
Penguji II

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Yeni Pristina Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL" beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam kode etik ilmiah. Demikian penyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sangsi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 17 Juli 2020

SEPTIANI YOLANDA SARI
NIM 17031156

iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Septiani Yolanda Sari

NIM : 170311556

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama , Hak Bebas Rolyalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

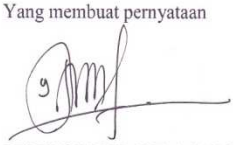

SEPTIANI YOLANDA SARI

NIM 17031156

v

HALAMAN MOTTO

- *Jagalan Allah, Dia pasti menjagamu, Jagalah Allah, Dia senantiasa*

  bersamamu (H.R Bukhari dan Muslim)
- *Kesabaran memang penuh ujian, jika anda selalu lulus, kemenangan itu akan kekal selamanya (Mario Teguh)*
- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al – Insyiroh : 6)*
- *Cintailan apa yang anda kerjakan, bukan mengerjakan apa yang anda cintai (Robert)*
- *"Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"*

  (Al – baqarah : 153)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk :

- Allah SWT terima kasih atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
- Untuk Mamah tercinta terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan sehingga saya dapat berada di titik tertinggi saya saat ini.
- Untuk Bapakku terima kasih telah menginspirasi kehidupanku selama ini.
- Teruntuk Sahabat – sahabatku yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini mutiara dewi, sri winingsih, rizka auliani, leni, dea, febi, nabila dan teman-teman yang lainnya terimakasih telah memberikan semangat dan bantuannya sehingga tugas akhir ini selesai.
- Untuk kantor BPBD Kota Tegal dan kelas 6J terimakasih atas kerjasamanya, sukses slalu.
- Para Dosen Politeknik Harapan Bersama, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Lokasi, Harga, Kualitas Bangunan dan Lingkungan Perumahan Terhadap Keputusan Pembelian Rumah di Marjan Regency" yang merupakan s alah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengalami banyak hambatan yang disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.Namun berkat bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Mc.Chambali, B.Eng, EE, M.Kom, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Ibu Erni Unggul, SU., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga tugas akhir ini selesai.
4. Ibu Dewi Kartika, SE selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberi banyak bantuan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

5. Bapak Andri Yudi Setiawan, S.Sos, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.
6. Seluruh Karyawan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal grup tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
7. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal yang telah menunaikan kewajibannya menyampaikan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Staff Karyawan Politeknik Harapan Bersama Tegal
9. Teman-teman baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan semangat, serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu dalam selesainya proposal Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Tegal, 17 Juli 2020

Septiani Yolanda Sari
17031110

ABSTRAK

Septiani Yolanda Sari. 2020. *Analisis Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal*. Program Studi : DIII- Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Pembimbing I : Erni Unggul SU., SE, M,Si; Pembimbing II : Dewi Kartika, SE.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada instansi pemerintah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlaukan aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal. Dari hasil penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal diketahui bahwa instansi tersebut belum seutuhnya menerapkan perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07.

Kata kunci : Aset Tetap, PSAP No. 07

ABSTRAC

Sari, Yolanda S. 2020. *Fixed Asset Treatment Analysis Based On PSAP No. 07 On Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal*. Diploma III Accounting Study Program of Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Erni Unggul Sedya Utami, Second Advisor: Dewi Kartika.

Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months to be used in government activities or utilized by the general public. Fixed assets have a major contribution in carrying out governance. Management of fixed assets that is not carried out optimally also cannot support more effective government activities and cannot realize good government goals. This research was a case study in government agencies, namely Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tegal City by using the research method of interview, observation and documentation. From the results of research on Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tegal City. it is known that the agency has not yet fully implemented the fixed assets treatment based on PSAP No. 07.

Keywords : Fixed Assets, PSAP No. 07

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Masalah 4

1.4 Manfaat Masalah 4

1.5 Batasan Masalah 5

1.6 Kerangka Berfikir 5

1.7 Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Tinjauan Atas Aset Tetap 9

2.1.1 Pengertian Aset 9

2.1.2 Pengertian Aset Tetap 9

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 10
2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 11
2.2 Pengakuan Aset Tetap Sektor Pemerintahan 13
2.3 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap Sektor Pemerintahan 14
2.4 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Sektor Pemerintahan 17
2.5 Pengungkapan Aset Tetap Sektor Pemerintahan 18
2.6 Penyusutan Aset Tetap 18
2.7 Penelitian Terdahulu 20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1 Lokasi Penelitian 23
3.2 Waktu Penelitian 23
3.3 Jenis Data 24
3.4 Sumber Data 25
3.5 Metode Pengumpulan Data 25
3.6 Metode Analisis Data 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Hasil Analisis Data 27
4.1.1 Peralatan dan Mesin 27
4.1.2 Aset Lain - Lain 28
4.1.3 Aset Tak Berwujud 28
4.2 Pembahasan 34
BAB V KESIMPULAN 46
5.1 Kesimpulan 46
5.2 Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN 49
1. Daftar Aset Tetap BPBD Kota Tegal..... 49

DAFTAR ISI GAMBAR

Halaman

1.6.1 Kerangka Berfikir 6

DAFTAR ISI TABEL

2.7.1	Penelitian Terdahul	20
4.2.1	Perbandingan Pengakuan Aset Tetap.....	34
4.2.2	Perbandingan Penguuran Aset Tetap	37
4.2.3	Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan	38
4.2.4	Perbandingan Penyusutan Aset Tetap.....	39
4.2.5	Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	41
4.2.6	Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik disektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Disamping itu, ada juga perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (*non profit)* seperti yayasan (Rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah (Halim 2008, 110 - 111)[1].

Untuk kelancaran kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal diperlukan aset tetap dalam setiap kegiatannya, oleh karena aset sangat penting bagi badan atau instansi pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang mengatur tentang asset tetap. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap. yang di lihat dari pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi asset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan asset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparasi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Standar ini menggantikan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan dilengkapi dengan pengantar standar Akuntansi Pemerintah yang disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP). Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah (PSAP PP 71 No. 07, 2010) [2].

Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, pelaporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan

Informasi mengenai kesesuaian cara dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya tersebut sesuai dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi tersebut juga unuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas akuntansi, wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset tetap yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi hingga saat ini BPBD KOTA Tegal belum sesuai dalam melakukan perbandingan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki, padahal penyusutan terhadap aset tetap sangatlah penting.

Dari uraian latar belakang sebagaimana telah disajikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah : "Bagaimana perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal ?"

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

1.4 Manfaat Peneliti

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi peneliti

   Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

2. Bagi Politeknik Harapan Bersama

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah pengetahuan untuk peneliti selanjutnya mengenai penelitian analisis perlakuan aset tetap.

3. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal

   Melalui kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

1.5 Batasan Masalah

Agar permasalah yang dikaji dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada perlakuan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

1.6 Kerangka Berpikir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dimana dalam menjalankan kewajiban negaranya maka instansi perlu melakukan adanya perlakuan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 adalah standar yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah

termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yang menyajikan laporan untuk mengatur tentang perlakuan akuntansinya Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

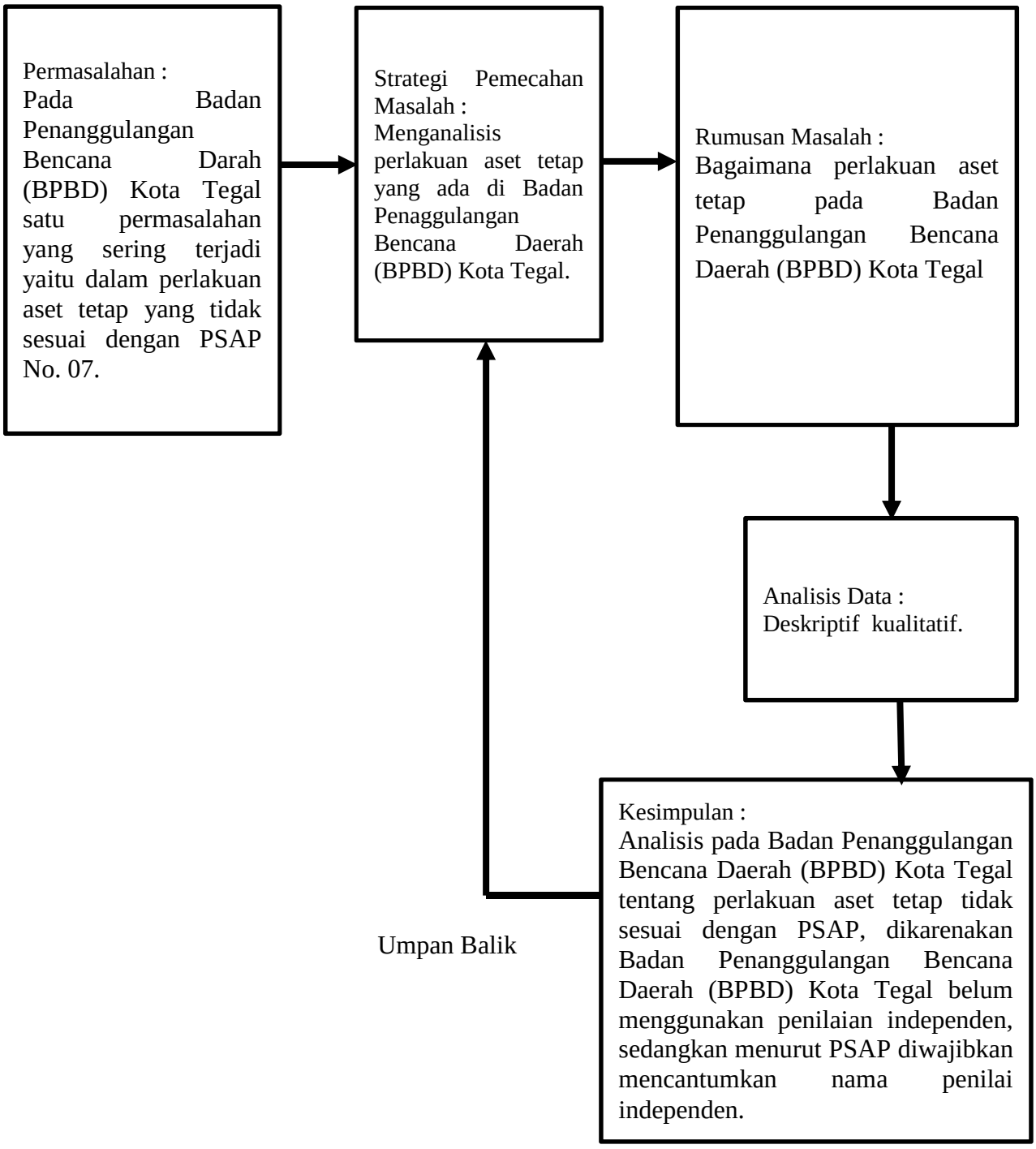

Gambar 1.6.1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

   BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

   BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Bab ini memuat teori-teori tentang pengertian aset tetap dan pengertian PSAP No. 07.

   BAB III METODE PENELITIAN

   Bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi garis tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi profil instansi, struktur organisasi instansi, tugas dan wewenang, kondisi perusahaan instansi saat ini, laporan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi garis beras dari hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literatur* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap. .

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisis informasi tambahan yang mendukung kelengkpan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Daftar Aset Tetap pada Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013 : 16)[3] Aset adalah sumber daya yang dikuasi oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa depan.

Menurut Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010 : 7)[4] Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang untuk diperlukan utuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (2013 : 16) [3] Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan

kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010 : 7)[4] Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Iskandar (dalam Akhyar 2010:59)[5] Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, ada beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1) Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.

5) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca

2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Definisi aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibebankan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset didefinisikanpada neraca pemerintahan adalah aset tetap (Fadil, 2016:12)[6].

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainya (instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor) adalah termasuk aset tetap pemerintah. Begitu pula dengan hak atas tanah merupakan aset tetap pemerintah. Sedangkan aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan perlengkapan) tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintahan. Aset tetap lainnya yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan pada pos aset lainnya. Misalnya tanah pemerintah yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain disajikan sebagai persediaan bukan aset tetap (Fadil, 2016:12)[7].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010:07) Klasifikasi aset tetap pemerintah atau barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1) Tanah
2) Peralatan dan Mesin
3) Gedung dan Bangunan
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
5) Aset Tetap Lainnya

2.2 Pengakuan Aset Tetap Sektor Pemerintahan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria pengakuan aset tetap pada sektor pemerintahan sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu meliputi:

a. Berwujud.
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Sementara itu, nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut mempunyai batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, manfaat ekonomi masa depan yang diberikan oleh aset tetap baik langsung maupun tidak langsung harus dinilai oleh entitas dan dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari perolehan aset tetap yaitu untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya (Fadil, 2016:12)[7].

Keandalan pengakuan aset tetap bergantung pada apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Keandalan pengakuan tersebut ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan Buletin Teknis (Bultek) No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, aset tetap yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, baik belum ada bukti kepemilikan yang sah dan/atau dikuasai/digunakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain, tetap disajikan dalam neraca sebagai aset tetap pemerintahan dan diungkapkan secara penuh (Fadil, 2016:12)[7].

2.3 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap Sektor Pemerintahan

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat disajikan dalam neraca. Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya konstruksi. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan

(*start-up cost*) dan pra produsi serupa juga tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (Fadil, 2016:12)[7].

Berikut komponen biaya perolehan masing-masing jenis aset tetap pemerintahan berdasarkan PSAP No. 07:

a) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut akan dimusnahkan.
b) Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, seperti harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya.
c) Gedung dan bangunan dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai seperti harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak.

d) Jalan, irigasi dan jaringan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

e) Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Penyerahan aset tetap tersebut akan andal jika didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Aset tetap yang dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah tidak termasuk aset donasi. Tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian

wewenang yang dimiliki pemerintah seperti penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintah. Aset-aset tetap tersebut harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh (Fadil, 2016:12)[7].

Suatu aset tetap juga dapat diperoleh secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran sebagian atau seluruh aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh. Nilai wajar aset yang dimaksud adalah nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Sementara itu, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar serupa sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi tersebut maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas (Fadil, 2016:12)[7].

2.4 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Sektor Pemerintahan

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau

dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya lalu dikeluarkan dari aset lainnya dengan memperlakukannya sebagai beban non operasional. Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis-teknis pengelolaan barang milik daerah (Fadil, 2016:12)[7].

2.5 Pengungkapan Aset Tetap Sektor Pemerintahan

Laporan keuangan entitas pemerintahan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap (Fadil, 2016:12)[7] sebagai berikut :

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai dan mutasi aset tetap lainnya.
c) Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2.6 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (Fadil, 2016:12)[7].

1) Faktor penentu penyusutan

Terkait dengan penyusutan aset tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan (beban depresiasi) aset tetap, yaitu :

a) Harga perolehan aset tetap

Harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.

b) Masa manfaat yang diharapkan

c) Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu atau nilai sisa)

Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.

2) Metode penyusutan

Metode garis lurus (*Straightline methode*)

a) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*).

b) Metode unit produksi (*unit of production method*).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yefta Masipuang (2015)	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado	Metode Deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado yaitu Pengakuan aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado telah sesuai dengan SAP No. 07. Dan Pengukuran/Penilaian aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado telah sesuai dengan SAP No. 07.
2	Shella Iko Sita (2017)	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	Metode Kualitaif dengan pendekatan Interpretif.	Penggolongan Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengakuan kepemilikan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07; Pengakuan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2013;

				Rumah Sakit Umum Daerah Genteng belum menerapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap; Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan; Penyajian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
3	Purnaningsih Rahayu (2017)	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Organisasi Nirlaba	Metode Kualitatif.	Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Yayasan STIKes Surya Global tidak sesuai dengan PSAK no. 16 tahun 2017. Berikut penerapan perlakuan akuntansi yang tidak sesuai yaitu Akuntansi tidak mengevaluasi pengakuan aset tetap, Manajemen akuntansi tidak mempunyai dasar pengukuran aset tetap, Manajemen akuntansi tidak menentukan biaya yang diatribusikan secara langsung dalam pengukuran awal aset tetap.

4	Akhyar Tipan (2015)	Analisis perlakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara	Metode Deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Pengakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP No. 07, Pengukuran/Penilaian aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP No. 07, dan Dalam hal Pengeluaran Setelah Perolehan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan SAP No. 07.
5	Carolina (2019)	Analisis perlakuan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado	Metode kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu Pengakuan aset tetap pada BPK-AD Kota Manado telah sesuai dengan SAP No. 07, Pengukuran/Penilaian suatu aset tetap pada BPK-AD Kota Manado telah sesuai dengan SAP No.07, Pengungkapan aset tetap pada BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan SAP No. 07.

(Sumber Data : Penelitian terdahulu, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Silalahi (2009:13)[8] metode penelitian merupakan komponen yang paling penting dalam penelitian. Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yang bertempat di Jl. KS Tubun No.25 (Lantai 2 gedung pemadam kebakara) Kota Tegal, Telepon : (0283) 24233 dari tanggal 03 Februari – 17 Maret 2020.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, terhitung mulai dari 3 Februari 2020 sampai dengan 3 April 2020. Tetapi penulis sebelum menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2020 terjadi penarikan semua mahasiswa/mahasiswi yang sedang melaksanakan penelitian.

Penarikan tersebut dilakukan oleh Direktur Politeknik Harapan Bersama dengan datangnya surat edaran dari program studi sehubungan dengan adanya wabah penyakit *Virus Covid-19* atau *Corona Virus*, sehingga mengharuskan semua mahasiswa/mahasiswi untuk belajar dan

bimbingan *online* di rumah saja untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data kualitatif

   Data kualitatif menurut Suliyanto (2005 : 134)[9] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat.

2) Data Kuantitatif

   Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005 : 135)[9] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan pembukuan aset tetap tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Tegal.

3.4 Sumber Data

1) Data Primer

   Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)[10] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini seperti wawancara dengan karyawan atau staf yang terkait dengan perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)[10] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti profil, serta dokumen dan catatan yang digunakan dalam menganalisis perlakuan aset tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:3)[11] mengemukakan bahwa pada penelitian deskriptif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1) Teknik Observasi

Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian agar memperoleh informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, observasi akan dilaksanakan langsung terhadap sistem dan prosedur pengeluaran kas yang sudah ditetapkan lsi BPBD Kota Tegal yang selanjutnya bendahara dijadikan sebagai narasumber atau informan pada saat observasi dilaksanakan

2) Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan komunikasi langsung atau tidak langsung dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang kompeten

pada bidang penelitian yang dimaksud. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan salah seorang pejabat yang mengetahui perlakuan aset tetap pada BPBD Kota Tegal.

3) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan,gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan dokumen pada penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data perlakuan aset tetap di BPBD KotaTegal.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Winartha (2006:155)[12] Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil observasi atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Fakta dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian serta membandingkan perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Tegal yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum lainnya di bidang penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Walikota Tegal No. 20 tahun 2014. Pada SKPD ini aset tetap memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset tetap tersebut lebih dari Rp. 300.000 sedangkan untuk aset tetap gedung dan bangunan akan diakui sebagai aset tetap apabila biaya perolehannya lebih dari Rp. 10.000.000. Cara perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal adalah perolehan barang langsung (LS). Aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin

   Jumlah peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal adalah 181 buah,

yang terdiri atas 42 alat untuk penyelamatan dengan total nilai Rp. 175,408,000 dan 125 alat kantor di antaranya meja biro, lemari arsip, komputer, pendingin udara, mesin printer dengan total nilai alat kantor dan rumah tangga adalah sebesar Rp. 349,843,250.

2. Aset lain-lain

Jumlah aset lain-lain yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal adalah 14 alat angkutan (Sepeda motor, mobil pick up, perahu karet, sepeda) dengan kondisi yang layak pakai bernilai Rp. 823.406.766.

3. Aset Tak Berwujud

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal tidak memilikiaset tek berwujud.

Daftar jenis aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yaitu sebagai berikut :

No	Nama Bidang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Barang (Dalam Rupiah)
1	Peralatan dan Mesin	167	Rp. 363.318.250
2	Aset Lain-Lain	14	Rp. 823.406.766
3	Aset tak Berwujud	-	-
	Total	181	Rp. 1.186.725.016

(Sumber Data : Data diolah, 2020)

a) Pengakuan Aset Tetap

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang ditentukan dengan menilai manfaat ekonomik yang dapat diberikan oleh pos tersebut dimasa yang akan datang, selain itu suatu aset tetap akan diakui sebagai aset tetap apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pembayaran atas aset tersebut. Dalam hal memperoleh aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal membuat perencanaan pengadaan barang yang kemudian melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang telah di tetapkan, pihak ketiga kemudian akan mengirimkan pengadaan aset tetap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal akan mengajukan surat perintah pembayaran dengan menyertakan dokumen yang di perlukan. Aset Tetap akan diakui pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila beberapa aset tetap dibeli secara bersamaan dan tiap-tiap aset tidak disebutkan harganya, maka total harga yang dibebankan harus dialokasikan ke masing-masing aset yang bersangkutan.

Contohnya :

Jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal melakukan pengadaan 5 (lima) unit printer dengan masing-masing harga beli sebesar Rp. 500.000, maka jurnal yang akan dibuat adalah :

SKPD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Printer Rp. 2.500.000

RK-PPKD Rp. 2.500.000

(untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin)

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin- Komputer Rp. 2.500.000

Di investasikan dlm aset tetap- komputer Rp. 2.500.000

(untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)

Jurnal yang di buat oleh BUD

RK-SKPD Rp. 2.500.000

Kas Umum Daerah Rp. 2.500.000

(untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin)

b) Pengukuran Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 Tahun 2010, Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap menggunankan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Karena penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan sangat memungkinkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, maka pengukuran keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal dinilai dengan biaya perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan atas aset tetap yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya instalasi untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan.

Contohnya :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal melakukan pengadaan AC sebanyak 5 unit. Untuk 1 unit AC harganya Rp. 5.000.000 kemudian biaya pemasangan untuk AC tersebut Rp. 400.000 untuk setiap unit. Maka jurnal yang dibuat adalah :

SKPD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- AC Rp. 27.000.000

RK-PPKD Rp. 27.000.000

(untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin)

Jurnal Korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin- AC Rp. 27.000.000

Di investasikan dlm aset tetap- AC Rp. 27.000.000

(untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)

Jurnal yang di buat oleh BUD

RK-SKPD Rp. 27.000.000

Kas Umum Daerah Rp. 27.000.000

(untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal peralatan dan mesin)

c) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditur*)

Dalam hal pengeluaran setelah perolehan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal tidak menetapkan batasan jumlah biaya yang dikpitalisasi terhadap aset tetap. Oleh sebab itu, hingga saat ini belum ada pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi adalah pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat aset yang diperlakukan sebagai biaya. Contoh jurnal unuk perlakuan ini adalah :

SKPD

Belanja Pemeliharaan Rp. 3.000.000

Piutang dari KUD Rp. 3.000.000

BUD

Belanja Pemeliharaan Rp. 3.000.000

Kas Umum Daerah Rp. 3.000.000

d) Penyusutan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal belum pernah melakukan penyusutan aset tetap. Belum dilakukannya penyusutan atas aset tetap dikarenakan belum adanya prosedur dan petunjuk teknis penyusutan aset tetap yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, semau asset tetap yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan saat pembelian. Di karenakan belum adanya petunjuk teknis mengenai penyusutan maka aset tetap yang sudah lebih masa manfaatnya namun masih dalam kondisi layak pakai maka aset tetap tersebut tetap disajikan dalam neraca dengan biaya perolehan saat awal pembelian.

e) Penghentian dan Pelepasan (*Retirement an Disposal*)

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal apabila terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian, atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal membuat daftar usulan barang yang akan dihapus. Apabila usulan penghapusan tersebut diterima maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca yang kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun hingga saat peneliti melakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota

Tegal, daftar usulan barang yang akan dihapus belum diproses. Jadi, aset-aset tersebut disajikan sebagai aset lain-lain.

f) Pengungkapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikaan tabel analisis perbandingan perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencaana Daerah (BPBD) Kota Tegal dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang Aset Tetap.

Tabel 4.2.1

Perbandingan pengakuan Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	a. Pengakuan aset tetap terjadi jika aset tetap yang dimiliki memberikan manfaat ekonomik masa depan.	Sesuai

		b. Peralatan dan mesin dapat diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	
b. Biaya Perolehan dapat diukur secara andal.		a. Biaya perolehan dapat diukur secara andal b. Biaya perolehan aset peralatan dan mesin dapat diukur secara andal.	Sesuai
c. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.		a. Diperoleh atau dibangun sesuai dengan maksud untuk digunakan. b. Peralata dan mesin yang diperoleh yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain untuk dapat digunakan.	Sesuai

d.	Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	a. Aset tetap akan diakui pada saat transaksi atas aset tetap tersebut terjadi. Contohnya 9 September maka aset tetap tersebut diakui pada tanggal 9 September. b. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikannya telah berpindah.	Sesuai

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Dari tabel perbandingan pengakuan aset tetap diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 4.2.2

Perbandingan pengukuran Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	a. Penilaian atas suatu aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal adalah dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap.	Sesuai
b. Biaya Perolehan dapat diukur secara andal.	a. Biaya perolehan suatu aset tetap pada Badan Penanggulangan	Sesuai

	Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal terdiri harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut	

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel perbandingan pengukuran aset tetap diatas, perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 4.2.3

Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau	a. Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau	Sesuai

	yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya terjadi (dikeluarkan).

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel perbandingan pengeluaran setelah perolehan diatas, perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 4.2.4

Perbandingan Penyusutan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Nilai penyusutan	a. Pada saat peneliti	Belum Sesuai

	untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	melakukan penelitian ini, BPBD Kota Tegal belum pernah melakukan penyusutan atas nilai aset tetap yang dimiliki. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel perbandingan penyusutan diatas, perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku tentang penyusutan suatu aset.

Tabel 4.2.5

Perbandingan Penghentian dan Pelepasan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	a. Suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.	Sesuai
b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos	b. Aset tetap didefinisikan merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan namun, jika aset	Sesuai

aset lainnya.	tetap tidak lagi memenuhi definisi yang ada maka aset tersebut akan dihentikan dari penggunaannya dan dipindahkan ke pos aset lain-lain.	

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Pada tabel perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap di atas, terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang penghetian dan pelepasan yang diterapkan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 4.2.6

Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	BPBD Kota Tegal	Keterangan
a. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian	a. BPBD Kota Tegal mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk	Sesuai

	yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.	
b.	setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau diperinci pada Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai
c.	ekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan,	laporan keuangan mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan	Sesuai

	pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya.

(Sumber data : Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel perbandingan pengungkapan aset tetap diatas, terlihat bahwa kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal menerapkan perlakuan yang sama dengan peraturan pemerintah yang berlaku mengenai pengungkapan suatu aset tetap. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yang sesuai dengan PSAP No. 07 sebagai beriukt :

1. Perbandingan pengakuan Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07
2. Perbandingan pengukuran Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07
3. Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07
4. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

5. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07

Hasil perbandingan dari tabel aset tetap diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yang belum sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu Perbandingan Penyusutan oleh BPBD Kota Tegal dengan PSAP No.07.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal bahwa Pengakuan aset tetap, Pengukuran atau penilaian aset tetap, Pengeluaran setelah perolehan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, Penghentian dan Pelepasan aset tetap, Pengungkapan Aset Tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07. Hanya ada 1 (satu) yang belum dilaksanakan berdasarkan PSAP No.07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal yaitu penyusutan aset tetap karena dalam pelaksanaan dilapangan belum ada prosedur atau petunjuk teknis penyusutan aset tetap. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan aset tetap pada Badan Peanggulanga Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal belum sesuai dengan PSAP No. 07.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal sudah baik namun akan lebih baik lagi apabila Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal segera melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, mengingat pentingnya penyusutan terhadap suatu aset.
2. Bagi pemerintah Kota Tegal, diharapkan agar segera mengeluarkan peraturan tentang prosedur dan teknis penyusutan atas aset tetap agar setiap SKPD yang ada di Kota Tegal dapat melakukan penyusutan terhadap aset ttetap yang dimiliki. Aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan jasa selain itu penyusutan aset tetap perlu dilakukan agar suatu entitas mengalokasikan cost dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik* (Akuntansi Keuangan edisi 3) Jakarta : salemba Empat. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/240/1/3.

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

[3] Ikatan Akutansi Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.

[4] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

[5] Akhyar Tipan. (2015) Analisis perlakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara, Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntasi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

[6] Muhammad Fadil. 06 Desember 2016. *PSAP 07 – Akuntansi Aset Tetap* (Online). https://mohammadfadlyassagaf.wordpress.com/2016/12/06/psap-07-akuntansi-aset-tetap/

[7] Ulber Silalahi, (2009). Metode Penelitian yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. https://docplayer.info/31525358-Bab-iii-metode-penelitian-yang-digunakan-untuk-menemukan-solusi-atas-suatu-masalah-ulber-silalahi.html

[8] Pontoh, winston, dkk. (2018). *IPTEKS Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Asset Tetap Pada Kantor Lurak Kleak.* Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

[9] Suliyanto. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi

[10] Sugiono, (2012). Pengertian penelitian Deskriptif. http://repository.upi.edu/3848/6/S_PSI_0800926_Chapter3.pdf

[11] Winartha, (2006). Pengertian Metode analisis deskriptif kualitatif. http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf

LAMPIRAN

Daftar Aset Tetap pada Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal
Bidang
Unit / Perangkat Daerah
Sub Unit
U P B

No.Urut	Nama Barang	Merk / Type / Alamat	Nomor Sertifikat Pabrik/ Nomor Plat	Tahun Pengadaan	Tahun Pembukuan	Kondisi Barang (B/RR/RB)	Harga Satuan
							1,553,313,016
1	Mesin Proses Apung Lain-lain	Mesin Tempel Yamaha E4OKMHL		2018	2018		49,335,000
2	Mesin Proses Apung Lain-lain	Mesin Tempel Yamaha E25BMH, 25 PK		2018	2018		39,490,000
3	Portable Water Pump	Pompa Air Honda WT40XK3		2018	2018		25,717,500
4	Portable Water Pump	Pompa Air Honda WT40XK3		2018	2018		25,717,500
5	Pick Up	Mitsubishi L 300	G. 9523 AE	2018	2018		176,495,000

6	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	Mitsubishi/Triton2.5L.oc	G. 9566 ZN	2016	2018	B	452,508,466
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1CWFI	G-9713-FE	2015	2015	B	15,895,000.00
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1CWFI	G-9694-FE	2015	2015	B	15,895,000.00
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1CWFI	G-9597-FE	2015	2015	B	16,365,000.00
10	Sepeda Motor	Yamaha Force Sporty	G. 9916 N	2014	2014	B	14,341,250.00
11	Sepeda Motor	Yamaha Force Sporty	G. 9647 N	2014	2014	B	14,341,250.00
12	Sepeda Motor	Kawasaki LX150C	G. 9601 ZN	2015	2018	B	28,061,000
13	Sepeda Motor	Kawasaki LX150C	G. 9602 ZN	2015	2018	B	28,061,000
14	Sepeda Motor	Kawasaki KLX 150S	G. 9603 ZN	2016	2018	B	30,721,900
15	Sepeda Motor	Kawasaki KLX 150S	G. 9604 ZN	2016	2018	B	30,721,900
16	Sepeda	Pacifik Mountain bike hitam kombinasi kuning dan putih		2017	2017	B	6,490,000.00
17	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	Perahu Karet 12 Orang 12 Penumpang		2018	2018		44,395,000
18	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	Perahu karet 8 Orang Kapasitas 8 Orang		2018	2018		32,780,000
19	Chain Saw	STIHL MS 382, 2 Tak		2018	2018		13,475,000

20	Chain Saw	STIHL MS 382, 2 Tak		2018	2018		13,475,000
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brother 2000 TR Manuar Portable 13		2017	2017	B	2,090,000.00
22	Filling Besi/Metal	Plat 4 Laci		2016	2016	B	2,420,000.00
23	Brand Kas	kunci putar		2016	2016	B	5,390,000.00
24	Peti Uang	kunci putar		2016	2016	B	605,000.00
25	Alat Penghancur Kertas	Aurora AS1225		2016	2016	B	3,355,000.00
26	Papan Nama Instansi	Papan Nama Kantor		2015	2015	B	1,485,000.00
27	Mesin Absensi	Microvition Mesin Finger print		2015	2015	B	5,052,500.00
28	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Rak Kartu Kendali		2015	2015	B	495,000.00
29	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Lemari Buku Pimpinan		2015	2015	B	2,219,500.00
30	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Meja telepo		2015	2015	B	495,000.00
31	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Filling Kabinet		2015	2015	B	2,128,500.00
32	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Filling Kabinet		2015	2015	B	2,128,500.00
33	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Filling Kabinet		2015	2015	B	2,128,500.00

34	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Lemari Arsip Sleding Kaca		2015	2015	B	2,722,500.00
35	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Lemari Arsip Sleding Kaca		2015	2015	B	2,722,500.00
36	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Lemari Arsip Sleding Kaca		2015	2015	B	2,722,500.00
37	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Lemari Arsip Sleding Kaca		2015	2015	B	2,722,500.00
38	Kursi Kerja	Armrest Vinil Hydrolic		2017	2017	B	1,485,000.00
39	AC Unit	LG split		2015	2015	B	8,030,000.00
40	AC Unit	LG split		2015	2015	B	8,030,000.00
41	AC Unit	2 PK Kompresor inverter		2017	2017	B	8,250,000.00
42	AC Split	LG split		2015	2015	B	5,280,000.00
43	Alat Pemanas	Sanken dipenser HWD. 730 N		2015	2015	B	1,980,000.00
44	Televisi	LG Display LED		2017	2017	B	3,850,000.00
45	Sound System	Active Speaker Sound Grace		2017	2017	B	15,350,000.00
46	Selang Penyemprot Air	Selang Buang Polyester		2018	2018		3,982,000
47	Selang Penyemprot Air	Selang Buang Polyester		2018	2018		3,982,000

48	Selang Penghisap Air	Selang Hisap Pabrikan		2018	2018		605
49	Selang Penghisap Air	Selang Hisap Pabrikan		2018	2018		605
50	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo 10 HV.002. KIA		2015	2015	B	9,944,000.00
51	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo 10 HV.002. KIA		2015	2015	B	9,944,000.00
52	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo 10 HV.002. KIA		2015	2015	B	9,944,000.00
53	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo 10 HV.002. KIA		2015	2015	B	11,219,000.00
54	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo 10 HV.002. KIA		2016	2016	B	9,900,000.00
55	PC Unit/ Komputer PC	Lenovo Intel core 13 6100		2017	2017	B	10,370,000.00
56	PC Unit/ Komputer PC / Komputer			2002	2018	RR	2,500,000
57	Lap Top	Lenovo 80E4		2015	2015	B	8,030,000.00
58	Lap Top	Lenovo 80E5		2016	2016	B	8,030,000.00
59	Personal Komputer Lain-lain	Samsung tablet		2015	2015	B	8,085,000.00
60	Printer	Canon inkjet MP 280		2015	2015	B	1,727,000.00
61	Printer	Canon inkjet MP 280		2015	2015	B	1,727,000.00

62	Printer	Canon inkjet MP 280		2015	2015	B	1,727,000.00
63	Printer	HP laserjet P110		2015	2015	B	1,595,000.00
64	Printer	Epson Dot matrik LQ 2190 ESC		2015	2015	B	7,480,000.00
65	Printer	Epson 805 stylush		2016	2016	B	4,400,000.00
66	Printer	Epson L360 Injekt Resolusi 5760		2017	2017	B	4,400,000.00
67	UPS	Icha ups		2015	2015	B	847,000.00
68	UPS	Icha ups		2015	2015	B	847,000.00
69	UPS	Icha ups		2015	2015	B	847,000.00
70	UPS	Icha ups		2015	2015	B	847,000.00
71	UPS	Icha ups		2016	2016	B	847,000.00
72	UPS	ICA 220V		2017	2017	B	847,000.00
73	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Meja Kerja Es. III (1 bh)		2015	2015	B	2,994,910.00
74	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Es. IV		2015	2015	B	1,878,030.00
75	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Es. IV		2015	2015	B	1,878,030.00

76	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Es. IV		2015	2015	B	1,878,030.00
77	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
79	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
80	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
81	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
82	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
83	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
84	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2015	2015	B	1,534,500.00
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2016	2016	B	1,540,000.00
86	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Meja Kerja Staf		2016	2016	B	1,540,000.00
87	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00
88	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00

90	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00
91	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00
92	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Meja Rapat		2015	2015	B	3,465,000.00
93	Meja Kerja	Particle board Mahogany		2017	2017	B	2,475,000.00
94	Meja Kerja	Segi Panjang	-	2002	2018	RR	400
95	Meja Kerja	Segi Panjang	-	2002	2018	RR	400
96	Meja Kerja	Segi Panjang	-	2002	2018	RR	400
97	Meja Kerja	Segi Panjang	-	2002	2018	RR	400
98	Meja Kerja	Segi Panjang	-	2002	2018	RR	400
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	kursi kerja		2015	2015	B	2,043,000.00
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Krj. Pejb.Es. IV		2015	2015	B	1,628,000.00
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Krj. Pejb.Es. IV		2015	2015	B	1,628,000.00
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Krj. Pejb.Es. IV		2015	2015	B	1,628,000.00
103	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00

104	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
105	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
106	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
108	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
109	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
110	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
112	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kursi Staf		2015	2015	B	512,325.00
113	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
114	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
115	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
116	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
117	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00

118	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
119	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
120	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
121	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
122	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
123	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
124	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
125	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
126	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
127	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
128	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
129	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
130	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
131	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00

132	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
133	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
134	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
135	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
136	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
137	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Rapat		2015	2015	B	346,500.00
138	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Meja Kursi Tamu Pimp Kursi Kayu		2015	2015	B	5,280,000.00
139	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Plat berkaca		2016	2016	B	3,095,000.00
140	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Plat berkaca		2016	2016	B	3,095,000.00
141	Camera + Attachment	Canon		2015	2015	B	5,995,000.00
142	Proyektor + Attachment	Sony Resolusi XGA (1024 X 768)		2017	2017	B	12,100,000.00
143	Layar Proyektor	Wall mount motorized screen		2017	2017	B	4,950,000.00
144	Megaphone	TOA ZR.2015S		2016	2016	B	825,000.00
145	Megaphone	TOA ZR.2015S		2016	2016	B	825,000.00

146	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
147	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
148	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
149	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
150	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
151	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
152	Handy Talky	ICOM V-88 Waterproof		2016	2016	B	2,310,000.00
153	Facsimile	Panasonic KX MB.2085		2015	2015	B	4,590,000.00
154	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
155	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
156	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
157	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
158	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
159	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396

160	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
161	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
162	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
163	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
164	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
165	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
166	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
167	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
168	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
169	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
170	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
171	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Pelampung Atunas Jaket Ful Body		2018	2018		396
172	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
173	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561

174	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
175	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
176	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
177	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
178	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
179	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
180	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561
181	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	Dayung Strenthened Aluminium		2018	2018		561

MENGETAHUI :
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tegal

ANDRI YUDI SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19740215 199302 1 001

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	Sabtu, 23/5/20	Pembelajaran Bimbingan TA & PKL	
2.	30 Mei 20	Acc judul, lanjut proposal	
3	26 Juni 20	Pengajuan proposal	
4	28 Juni 20	Revisi proposal 1	
5.	3 Juli 20	Acc proposal Lanjut TA bab 1-3	
6.	10 Juli 20.	Pengajuan TA	
7	12 Juli 20.	Revisi bab 1-3. Lanjut bab 4-5 Serahkan TA Lengkap	
8	15 Juli 20	Revisi Bab 5	
9.	17/7-20	Acc TA Siap Sidang	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Samapi Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	18 Maret 2020	Pengajuan judul + ACC judul proposal + TA.	
2.	5 Juni 2020	pengajuan proposal	
2	7 Juni 2020	Revisi 1. Proposal	
3	12 Juni 2020	ACC Proposal	
4	9 Juli 2020	Pengajuan TA BAB 1 - 5	
5	10 Juli 2020	Revisi 1 TA BAB 1 - 5	
6	11 Juli 200	ACC TA.	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Samapi Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Erni Unggul, SU.,SE, M.Si
NIPY	: 10.006.028
Jabatan	: Dosen Pembimbig I

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama	: Septiani Yolanda Sari
NIM	: 17031124
Prodi	: D3 Akuntansi
Judul TA	: ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO.07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari :
   Waktu :
   Tempat :

2. Hari :
   Waktu :
   Tempat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, September 2020
Dosen Pembimbing

Erni Unggul, SU.,SE, M.Si
NIPY: 10.006.028

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Kartika, SE
NIPY : 009.013.158
Jabatan : Dosen Pembimbig II

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : Septiani Yolanda Sari
NIM : 17031156
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO.07 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEGAL

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari :
   Waktu :
   Tempat :

2. Hari :
   Waktu :
   Tempat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, September 2020
Dosen Pembimbing

Dewi Kartika, SE
NIPY: 009.013.158

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
	6/09/20	Abstrak	

Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)